

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat

Sasaran Daerah: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

Misi 5: Meningkatnya kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Tujuan: Meningkatnya perekonomian secara berkelanjutan berdasarkan potensi ekonomi lokal

Sasaran Daerah: Meningkatnya kebijakan perekonomian daerah dan pembinaan pengendalian bidang perekonomian

Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Banten

| NO | Sasaran | Indikator Sasaran | Definisi Operasional | Rumus Perhitungan | Penanggung Jawab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|------------------|----------|-------|--------------|---|---------------------|-----|---|---|--------------------|-----|---|---|-------------------|-----|--|---|-------------------|-----|---|---|-----------------|-----|--|--|--------------|-------------|--|-------------------------------|
| | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran Strategis Esselon II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien | Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Untuk mendorong Perangkat Daerah secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen</th> <th>Bobot</th> <th>Sub Komponen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>30%</td> <td>a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>25%</td> <td>a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15%</td> <td>a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Internal</td> <td>10%</td> <td>a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Capaian Kinerja</td> <td>20%</td> <td>a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | No | Komponen | Bobot | Sub Komponen | 1 | Perencanaan Kinerja | 30% | a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%). | 2 | Pengukuran Kinerja | 25% | a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%) | 3 | Pelaporan Kinerja | 15% | a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%) | 4 | Evaluasi Internal | 10% | a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%) | 5 | Capaian Kinerja | 20% | a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%) | | Total | 100% | | Kepala Biro Bina Perekonomian |
| No | Komponen | Bobot | Sub Komponen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30% | a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 25% | a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15% | a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Evaluasi Internal | 10% | a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Capaian Kinerja | 20% | a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat

Sasaran Daerah: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

Misi 5: Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Tujuan: Meningkatnya perekonomian secara berkelanjutan berbasis potensi ekonomi lokal

Sasaran Daerah: Meningkatnya kebijakan perekonomian daerah dan pembinaan pengendalian bidang perekonomian

Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Banten

| NO | Sasaran | Indikator Sasaran | Definisi Operasional | Rumus Perhitungan | Penanggung Jawab |
|--|------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| Indikator Kinerja Program (esselon III) | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Pelayanan Perkantoran | Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | Dokumen akuntabilitas penatausahaan dan pencapaian kinerja program | $\% = \frac{(\text{Jumlah Laporan yang sesuai SAP})}{(\text{Jumlah dokumen laporan})} \times 100$ | Kepala Bagian Sarana Perekonomian |
| | | Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah | dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah | $\% = \frac{(\text{Jml dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang sesuai parameter})}{(\text{Jml dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang disusun})} \times 100$ | |
| | | Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah | Dokumen untuk mengukur dukungan sarana dan prasarana kantor yang mendukung kelancaran organisasi | $\% = \frac{(\text{Jml Penyediaan Dukungan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran})}{(\text{Jml Penyediaan Dukungan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran yang tersedia})} \times 100$ | |
| | | Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | Dokumen untuk mengukur peningkatan kapasitas aparatur organisasi | $\% = \frac{(\text{Jml Aparatur yang mendapat sertifikat pada tahun n})}{(\text{Jml Aparatur yang mengikuti pelatihan pada tahun n})} \times 100$ | |

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat

Sasaran Daerah: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

Misi 5: Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Tujuan: Meningkatnya perekonomian secara berkelanjutan berbasiskan potensi ekonomi lokal

Sasaran Daerah: Meningkatnya kebijakan perekonomian daerah dan pembinaan pengendalian bidang perekonomian

Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Banten

| NO | Sasaran | Indikator Sasaran | Definisi Operasional | Rumus Perhitungan | Penanggung Jawab |
|---|--|--|--|--|------------------------------|
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis Esselon IV | | | | | |
| 1 | Terlaksananya kegiatan Tata Usaha Biro Bina Perekonomian | Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penyediaan barang dan jasa, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD dan terwujudnya akuntabilitas penatausahaan keuangan | Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penyediaan barang jasa perkantoran, penyusunan laporsan kinerja dan neraca aset, koordinasi dan konsultasi dan peningkatan kapasitas aparatur (5 dokumen) | <i>Σ Dokumen Kegiatan Tata Usaha</i> | Kepala Sub-Bagian Tata Usaha |

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompentensi serta melayani masyarakat

Sasaran Daerah: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

Misi 5: Meningkatnya kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Tujuan: Meningkatnya perekonomian secara berkelanjutan berbasiskan potensi ekonomi lokal

Sasaran Daerah: Meningkatnya kebijakan perekonomian daerah dan pembinaan pengendalian bidang perekonomian

Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Banten

| NO | Sasaran | Indikator Sasaran | Definisi Operasional | Rumus Perhitungan | Penanggung Jawab |
|--|---|--|--|---|-----------------------------------|
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis Esselon II | | | | | |
| 1. | Meningkatnya kebijakan perekonomian daerah dan pembinaan pengendalian bidang perekonomian | Capaian kebijakan bidang perekonomian daerah | Dokumen Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang terdiri dari dokumen kebijakan bidang sarana perekonomian, dokumen kebijakan bidang industry jasa dan ketenagakerjaan, dokumen kebijakan bidang produksi daerah | $\Sigma \text{Dokumen Kebijakan Perekonomian}/\text{tahun}$ | Kepala Biro Bina Perekonomian |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis Esselon III | | | | | |
| 2. | Meningkatnya Penataan Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah | Jumlah Dokumen Kebijakan Sarana Perekonomian | Dokumen Kebijakan Sarana Perekonomian Yang terdiri dari Dokumen perumusan kebijakan BUMD dan Lembaga Keuangan Daerah, Dokumen perumusan kebijakan Penanaman Modal dan Promosi | $\Sigma \text{Dokumen Kebijakan Sarana Perekonomian}$ | Kepala Bagian Sarana Perekonomian |

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompentensi serta melayani masyarakat

Sasaran Daerah: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

Misi 5: Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Tujuan: Meningkatnya perekonomian secara berkelanjutan berbasis potensi ekonomi lokal

Sasaran Daerah: Meningkatnya kebijakan perekonomian daerah dan pembinaan pengendalian bidang perekonomian

Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Banten

| NO | Sasaran | Indikator Sasaran | Definisi Operasional | Rumus Perhitungan | Penanggung Jawab |
|----|---------|--|--|---|---|
| | | Jumlah Dokumen Kebijakan Industri Jasa dan Ketenagakerjaan | Dokumen Kebijakan Industri Jasa dan Ketenagakerjaan yang terdiri dari Dokumen perumusan kebijakan Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dokumen Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dokumen Perumusan Kebijakan Ekonomi Kreatif | Σ Dokumen Kebijakan Indsustri Jasa dan Ketenagakerjaan | Kepala Bagian Industri Jasa dan Ketenagakerjaan |
| | | Jumlah Dokumen Kebijakan Produksi Daerah | Dokumen Kebijakan Bidang Produksi Daerah yang terdiri dari Dokumen Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Dokumen Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan, Dokumen Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Σ Dokumen Kebijakan Produksi Daerah | Kepala Bagian Produksi Daerah |

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompentensi serta melayani masyarakat

Sasaran Daerah: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

Misi 5: Meningkatnya kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Tujuan: Meningkatnya perekonomian secara berkelanjutan berbasiskan potensi ekonomi lokal

Sasaran Daerah: Meningkatnya kebijakan perekonomian daerah dan pembinaan pengendalian bidang perekonomian

Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Banten

| NO | Sasaran | Indikator Sasaran | Definisi Operasional | Rumus Perhitungan | Penanggung Jawab |
|--|---|--|---|--|---|
| Indikator Kinerja Kegiatan (Esselon IV) | | | | | |
| 2 | Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan BUMD dan Lembaga Keuangan | Capaian Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan BUMD dan Lembaga Keuangan | Dokumen Perumusan Kebijakan BUMD dan Lembaga Keuangan (4 dokumen) | Σ Dokumen Kebijakan Perumusan Kebijakan BUMD dan Lembaga Keuangan | Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan BUMD dan Lembaga Keuangan |
| 3 | Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Promosi | Capaian Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Promosi | Dokumen Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Promosi (5 dokumen) | Σ Dokumen Kebijakan Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Promosi | Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Promosi |
| 4 | Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | Capaian Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | Dokumen Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (1 dokumen) | Σ Dokumen Kebijakan Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM |

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompentensi serta melayani masyarakat

Sasaran Daerah: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

Misi 5: Meningkatnya kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Tujuan: Meningkatnya perekonomian secara berkelanjutan berbasis potensi ekonomi lokal

Sasaran Daerah: Meningkatnya kebijakan perekonomian daerah dan pembinaan pengendalian bidang perekonomian

Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Banten

| NO | Sasaran | Indikator Sasaran | Definisi Operasional | Rumus Perhitungan | Penanggung Jawab |
|----|--|---|--|---|--|
| 5 | Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | Capaian Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | Dokumen Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (3 dokumen) | Σ Dokumen Kebijakan Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 6 | Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Capaian Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Dokumen Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (5 dokumen) | Σ Dokumen Kebijakan Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 7 | Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan | Capaian Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan | Dokumen Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (9 dokumen) | Σ Dokumen Kebijakan Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan | Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan |

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompentensi serta melayani masyarakat

Sasaran Daerah: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

Misi 5: Meningkatnya kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Tujuan: Meningkatnya perekonomian secara berkelanjutan berbasis potensi ekonomi lokal

Sasaran Daerah: Meningkatnya kebijakan perekonomian daerah dan pembinaan pengendalian bidang perekonomian

Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Banten

| NO | Sasaran | Indikator Sasaran | Definisi Operasional | Rumus Perhitungan | Penanggung Jawab |
|----|--|---|--|---|--|
| 8 | Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan | Capaian Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan | Dokumen Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan (2 dokumen) | Σ Dokumen Kebijakan Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan | Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan |
| 9 | Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Capaian Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Dokumen Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (4 dokumen) | Σ Dokumen Kebijakan Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

Serang, 8 November 2019
**Pt. KEPALA BIRO BINA PEREKONOMIAN
 SETDA PROVINSI BANTEN**

Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19690219 200112 1 001